

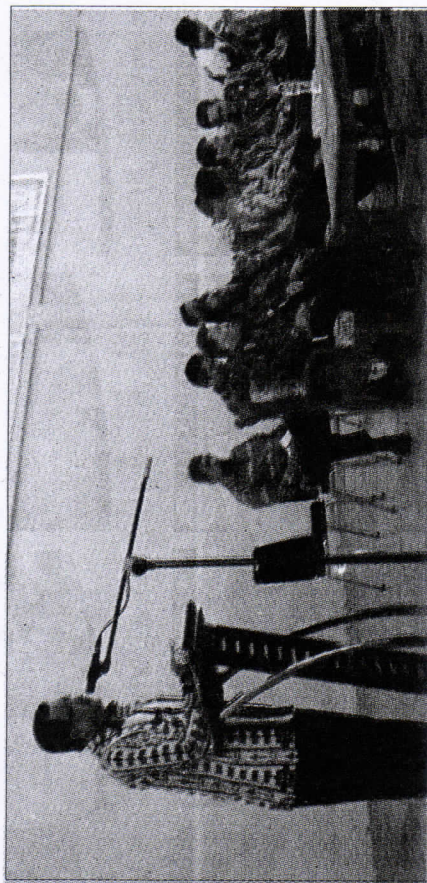


# Nilai Aset Disdikpora Masih Banyak Nol

**PUTUSSIBAU**—Untuk menyelesaikan persoalan aset daerah di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kapuas Hulu mengundang seluruh kepala sekolah (TK, SD, SMP, SMA/SMK), Pengawas Sekolah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) se-Kapuas Hulu. Ada 595 peserta yang hadir pada acara yang dibuka Bupati Kapuas Hulu A.M Nasir SH, Kamis (20/11) Gedung Volly Indoor, Putussibau.

Berdasarkan catatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kapuas Hulu, Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Pisdikpora) Kapuas Hulu yang masih bernilai nol sekitar 133 persil. Sehingga berdampak terhadap Pemkapas Hulu yang sedang berupaya untuk mewujudkan opini penilaian dari BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun 2015 mendatang.

Untuk itu, Disdikpora Kapuas Hulu mengumpulkan seluruh Kepala Sekolah (TK, SD, SMP, SMA/SMK), Pengawas Sekolah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Kapuas Hulu. Ada 595 orang yang hadir dalam rangka mendengarkan arahan umum dari Bupati dan Kepala Disdikpora Kapuas Hulu mengenai pendataan aset sekolah dalam rangka pencapaian



**PENGARAHAN:** Ratusan peserta mendengarkan pengarahan umum dari Bupati Kapuas Hulu, A.M Nasir SH.

WTP dari BPK RI dalam mengelola manajemen keuangan daerah Kapuas Hulu," tutur Politisi PPP ini.

Kepala Disdikpora Kapuas Hulu Petrus Kusnadi, mengatakan opini WTP bukanlah hal yang mustahil diraih. Asalkan seluruh komponen yang ada terutama jajaran Disdikpora yang memiliki aset cukup besar, dapat dilakukan pencatatan dan pengamanan aset sesuai dengan ketentuan peraturan pengelolaan barang milik daerah untuk itu pihaknya akan berusaha menyelesaikan persoalan aset ini.

"Saya memandang perlu untuk segera melakukan pembenahan pengelolaan barang milik daerah, sehingga aset-aset, baik aset gedung maupun tanah dapat dicatat dan diamanatkan seluruh komponen Disdikpora Kapuas Hulu," kata Mantan Kabid Perencanaan Pembangunan (P2) Setia Kapuas Hulu yang mendapat promosi jabatan untuk dilantik sebagai Kepala Disdikpora Kapuas Hulu pekan lalu.

Untuk itu ia mengajak seluruh Kepala UPT dan Kepala Sekolah untuk membantu membenahi aset-aset mereka dengan melakukan pendekatan kepada pemangku kepentingan. Baik tokoh masyarakat maupun para ahli waris. (aan)

tersebut akan digunakan oleh anak cucu dari sang pemberi hibah," kata Bupati. Kasus ini muncul akibat tidak dilakukannya proses administrasi hibah secara benar pada masa penghibahan masa-masa orde baru.

Untuk itu Bupati meminta semua pihak dapat bekerjasama dengan Disdikpora untuk melakukan pendataan dan penataan aset kekayaan daerah di sektor pendidikan ini yang dibantu oleh bidang aset DP- PKAD Kapuas Hulu. "Sehingga pada tahun 2015, Pemkab Kapuas Hulu bisa meraih predikat

sungan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Apabila aset kekayaan tidak terdata dan tertata dengan baik akan menimbulkan masalah di masyarakat. S

eperti bakal hilangnya ban- gunan milik negara yang ada di atasnya, baik itu kantor, rumah dinas maupun sarana pendidikan atau sekolah yang tersebar di seluruh desa dan dusun.

"Ini sudah terjadi di beberapa kecamatan, dimana ada beberapa bangunan milik negara, termasuk sekolah yang berdiri di atas tanah hibah dituntut un-

tuk dirobohkan, karena tanah

ian target penilaian WTP pada tahun 2015.

"Kami masih mengalami masalah yang cukup rumit, yakni belum terdatanya aset kekayaan daerah. Sehingga tidak bisa meraih predikat WTP dalam bidang pengelolaan keuangan oleh BPK. Predikat ini akan berdampak pada penyaluran keuangan dari pusat dalam bentuk DAU serta berdampak pada penarikan minat investor untuk menanamkan modalnya di daerah Kapuas Hulu ini," terang Nasir.

Menurut Nasir, pendataan aset sangat penting bagi kelang-